



Legislatif Menolak

KALANGAN legislatif dipastikan menolak wacana dimulainya kembali sekolah tatap muka, sepanjang status tanggap darurat belum dicabut. Sebab, selama status tersebut masih melekat, artinya situasi dan kondisi Kota Yogyakarta belum sepenuhnya aman dari

pandemi.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Krisnadi Setyawan, mengatakan bahwa vaksinasi bagi seluruh guru dan tenaga kependidikan tidak bisa dijadikan tolak

• ke halaman 7

BELAJAR TATAP MUKA

- Pemkot Yogya merencanakan menggelar belajar tatap muka untuk SD-SMP pascapandemi.
- Sekarang sedang dikaji persiapan sekolah untuk menggelar belajar tatap muka di tengah pandemi.

- Satu rencananya adalah kuota maksimal 50% per kelas, atau sama saja satu orang.
- Total ada 5.975 orang, mencakup baik guru maupun karyawan di sekolah, yang akan divaksin selama 3 hari.

Legislatif

• Sambungan Hal 1

ukur pemberlakuan kembali kegiatan belajar mengajar (KBM) luring ini.

"Jauh sebelum vaksinasi pun ukurannya tetap status tanggap darurat. Jadi, selama itu tidak dicabut, DPRD tetap menolak KBM tatap muka, ya," teranginya, Minggu (21/3).

Bukan tanpa alasan, lanjut Krisnadi, untuk menca- but status tanggap darurat, pemerintah harus menja- min kriteria terkait rasio pe- nularan, rasio positif, sam-

pai rasio meninggal dunia, benar-benar sudah terkenda- li. Seandainya itu terjamin, maka wacana sekolah tatap muka tersebut sudah layak.

"Nah, sekarang pertanyaannya, pemerintah apakah bisa membuktikan kalau Kota Yogyakarta benar-benar sudah di- ambang batas aman? Kan se- perti itu," ungkapnya.

Pollitisi Partai Gerindra itu memahami, berulang kali Pemkot Yogyakarta mengelu- arkan klaim bahwasanya ke- bijakan Pemberlakuan Pem- batasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro berha- sil menurunkan angka kasus Covid-19. Hanya saja, status

tanggap darurat tetap tak kun- jung dicabut.

"Kalau sekarang diklaim kasus sudah menurun, ya, dicabut dong tanggap daru- ratnya. Karena kalau KBM tatap muka itu dilaksana- kan, orang tua yang dimin- tal persetujuan. Artinya, itu jadi tanggung jawab masing- masing," katanya.

Oleh sebab itu, legislatif, melalui Komsis D, sangat ber- hati-hati saat mengkaji wa- cana Wali Kota Yogyakarta yang bakal memulai pembel- ajaran tatap muka ini sele- pas Idulfitri nanti. Menurut Krisnadi, pemkot pun harus mempertimbangkan secara

matang, sekaligus tak perlu tergesa-gesa.

"Kami akan sangat ketat soal itu. Selama ukuran-ukuran penularan, tingkat positif dan ketersediaan ruang pe- rawatan di fasilitas kesehat- an belum mencukupi, saya rasa kita harus menahan (KBM tatap muka) dulu, ya," tandasnya.

"Kalau memang KBM da- ring dinilai tidak efektif, ya, pemkot harus pintar-pintar cari cara, bagaimana pen- didikan jarak jauh itu dapat menciptakan kualitas. Itu kan juga tugas pemerintah buat cari cara," imbuh Kris- nadi, (aka)

Patut Dicoba Dengan Prokes Ketat

KEPALA Sekolah SMP Negeri 1 Kota Yogyakarta Niken Sasanti menjelaskan, persiapan pembelajaran tatap muka tingkat SMP sudah dilakukan oleh jajarannya sejak lama. Salah satu yang terpenting terkait penambahan sarana dan prasarana (sarpras) lingkungan sekolah.

"Itu sudah lama kami siapkan, SOP-nya kan harus ada wastafel, *hand sanitizer*, lalu ada jalur keluar masuknya dan beberapa rambu sudah kami siapkan," katanya kepada *Tribun Jogja*, Minggu (21/3).

Selain itu, lanjut Niken dirinya juga telah menyiapkan ruang kelas yang nantinya akan digunakan para siswa bila mana pembelajaran tatap muka benar-benar dilaksanakan. "Sejauh ini masih sebatas itu saja, sih. Namun kalau arahan tatap muka sudah ada, tetapi orang tua tidak mengizinkan kan tidak bisa," ujar Niken..

Masih kata Niken, persoalan pembelajaran via daring lainnya justru terfokus pada pendampingan orang tua murid. "Mungkin kalau di kelas guru yang bertanggung jawab dampingi, kalau lewat daring kan waktu orang tua lebih banyak. Sementara orang tua ada kegiatan lain, jadi itu masalahnya," tegasnya.

Meski lampu hijau pembelajaran tatap muka dari Wali Kota Yogyakarta sudah menyala, akan tetapi kekhawatiran para guru terhadap muridnya saat pembelajaran tatap muka tak bisa lagi dimungkiri. Niken menilai, anak-anak usia belasan tahun lebih sulit lebih sulit diatur daripada anak usia remaja hingga dewasa.

Akan tetapi, lanjut Niken, mau tidak

mau pembelajaran tatap muka perlu dicoba agar nasib para siswa ke depan bisa lebih baik. Ditanya sudahkah membuat kajian antara pemangku kebijakan dengan para komite sekolah, Niken mengakui hal itu belum dilakukan.

"Tapi mau tidak mau harus dicoba, kita tidak bisa menunggu sampai kapan? Apakah mau sampai seperti ini terus? Dan saya harapkan anak-anak patuh prokes," terang Niken.

Kondisi tak jauh berbeda juga dialami Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Yogyakarta, Nuryani Agusti, yang saat ini juga sedang harap-harap cemas terkait keberlangsungan pembelajaran tatap muka.

Ia sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 1 Yogyakarta Niken Sasanti. Meskipun arahan tatap muka dari pemerintah turun, tetap saja persetujuan wali murid menjadi kunci utama pelaksanaan kegiatan belajar tatap muka boleh atau tidak dilakukan.

Akan tetapi, Nuryani menegaskan apabila pihak wali murid tidak mengizinkan anaknya untuk belajar tatap muka, pihak sekolah tetap akan memfasilitasi pembelajaran daring. "Nah, terkait izin itu saja belum dibahas, dan kalau wali murid tidak mengizinkan kami tetap fasilitasi untuk daring," jelas dia.

Terkait persiapan sarpras, Nuryani menegaskan bahwa saat ini pihaknya telah menyiapkan sekitar 70 wastafel yang siap digunakan para siswa. Selain itu, terdapat pula rambu-rambu yang wajib dipatuhi para siswa ketika telah

memasuki lingkungan sekolah.

Sementara terkait kuota yang di-bolehkan untuk mengikuti belajar tatap muka, lanjut Nuryani, hal itu masih menunggu arahan dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. "Karena ini kaitannya kesehatan anak, pastinya ada pembatasan," ungkap dia.

Lagi-lagi para kepala sekolah merasa waswas apabila pembelajaran tatap muka di Kota Yogyakarta dilakukan lebih awal. Kali ini Kepala SMP Negeri 4 Yogyakarta, Suramanto yang merasakan keresahan yang sama.

Secara administrasi, SMP 4 Yogyakarta telah disurvei oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Pemkot Yogyakarta waktu itu telah melakukan verifikasi dan validasi terkait SOP yang semestinya dijalankan bagi sekolah yang hendak mengadakan pertemuan tatap muka.

Oktober tahun lalu, pihaknya mengadakan kelonggaran konsultasi, di mana dalam hal ini SMP Negeri 4 Yogyakarta meminta pendapat para wali murid kelas IX jika pembelajaran tatap muka dilakukan meski masih dalam suasana pandemi.

"Jawabannya mereka bersedia. Tapi hanya untuk kelas sembilan saja karena mau ujian. Ya, ada 164 siswa yang menyetujui. Tapi dalam operasionalnya hanya 8 siswa saja dalam satu kelas. Begitu rencananya waktu itu," ungkapnya.

Sementara untuk kegiatan tatap muka di dalam kelas, hingga saat ini pihaknya masih belum menerima petunjuk dan teknis dari pemangku kebijakan. (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005